

DISKRIMINASI ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN: STUDI KASUS PADA PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN DATA IFLS

Andre Saputra¹
I Wayan Sukadana²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
(Unud), Bali, Indonesia
e-mail: saputraandre660@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan era globalisasi yang pesat menyebabkan munculnya berbagai gerakan termasuk di dalamnya adalah gerakan emansipasi wanita yaitu mengenai kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pengeluaran rumah tangga antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan data IFLS. Data IFLS yang digunakan adalah dari gelombang tahun 1997 sampai dengan gelombang tahun 2014. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan perhitungan diskriminasi dan diolah dengan aplikasi Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari pola pengeluaran masyarakat untuk biaya pendidikan anak data IFLS 2 hingga IFLS 5 terus meningkat. Pengeluaran pendidikan anak menurut jenis kelamin di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun (Data IFLS2 sampai IFLS 5). Berdasarkan desa kota menunjukkan bahwa secara umum terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan anak untuk di daerah pedesaan dan perkotaan (Data IFLS2 sampai IFLS 5). Perbandingan pengeluaran pendidikan anak laki-laki dan perempuan berdasarkan daerah menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di masing-masing daerah, yaitu Sumatra, Jawa-Bali dan Kalimantan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku pada masing-masing daerah.

Kata Kunci: diskriminasi gender, pengeluaran, pendapatan, IFLS

ABSTRACT

The rapid development of globalization era led to the emergence of various movements including the movement of women's emancipation that is about gender equality. This research aims to analyze the household expenditure gap between men and women in Indonesia with secondary data from the publication of the Central Bureau of Statistics and IFLS data. IFLS data used is used from 1997 to 2014. Analysis will be done by using the calculation of discrimination with Stata application. The results showed that the pattern of public expenditure for the cost of education of children IFLS 2 until IFLS 5 continues to increase. Education expenditures of children by sex in Indonesia show there is a difference in educational expenditures between boys and girls from year to year (IFLS2 until IFLS 5). Based on urban villages indicating that there is a general difference in educational expenditures of children for rural and urban areas (IFLS 2 to IFLS 5). Comparison of educational expenditure of boys and girls by region shows that are difference in educational expenditure between boys and girls in Sumatra, Java-Bali and Kalimantan, due to differences in economic, social and cultural development prevailing in each region.

Keywords: gender discrimination, household expenditure, income, IFLS

PENDAHULUAN

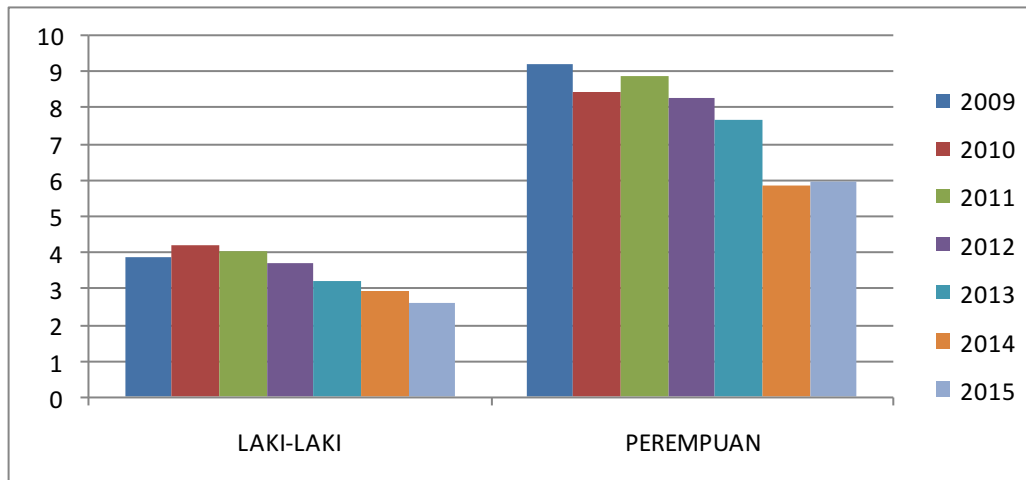
Perkembangan era globalisasi yang pesat menyebabkan munculnya berbagai gerakan termasuk di dalamnya adalah gerakan emansipasi wanita yaitu mengenai kesetaraan gender. Timbulnya gerakan emansipasi wanita ini dipicu dari munculnya *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. *Millennium Development Goals* (MDGs) merupakan deklarasi yang memuat delapan butir tujuan untuk dicapai, terkait kemiskinan, pendidikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kesehatan, lingkungan hidup dan pengembangan kemitraan global. Kesetaraan gender ialah salah satu tujuan dalam *MDGs* yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kesetaraan gender diarahkan pada setiap lini kehidupan. Pencaian tujuan terkait dengan gender yang termuat dalam MDG's sudah terwujud dengan baik, tetapi kembali muncul sebuah program baru dalam proses pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen dari berbagai negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). Salah satu tujuan yang menjadi *Goals* No.5 adalah mengenai permasalahan ketidaksetaraan gender, perampasan hak, kesempatan perempuan dan anak perempuan.

Quayes dan Richard (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran rumah tangga. Asumsi klasik yang berkembang di masyarakat adalah kaum laki-laki dianggap lebih bertindak rasional, sedangkan wanita lebih sering terbawa perasaan (Espinal, 1997). Kehidupan perempuan mengalami ketertinggalan pada setiap sektor kehidupan. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dimulai dari perbaikan pada sisi pendidikan (Takahashi, 2011). Pendidikan

merupakan salah satu investasi SDM yang akan memberikan perubahan bagi pembangunan suatu negara (Purnastuti *et al.*, 2013). Pada Gambar 1 akan disajikan perbandingan angka buta huruf berdasarkan jenis kelamin selama tahun 2009-2015 di Indonesia.

Gambar 1 Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke atas yang Buta Huruf berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia tahun 2009-2015



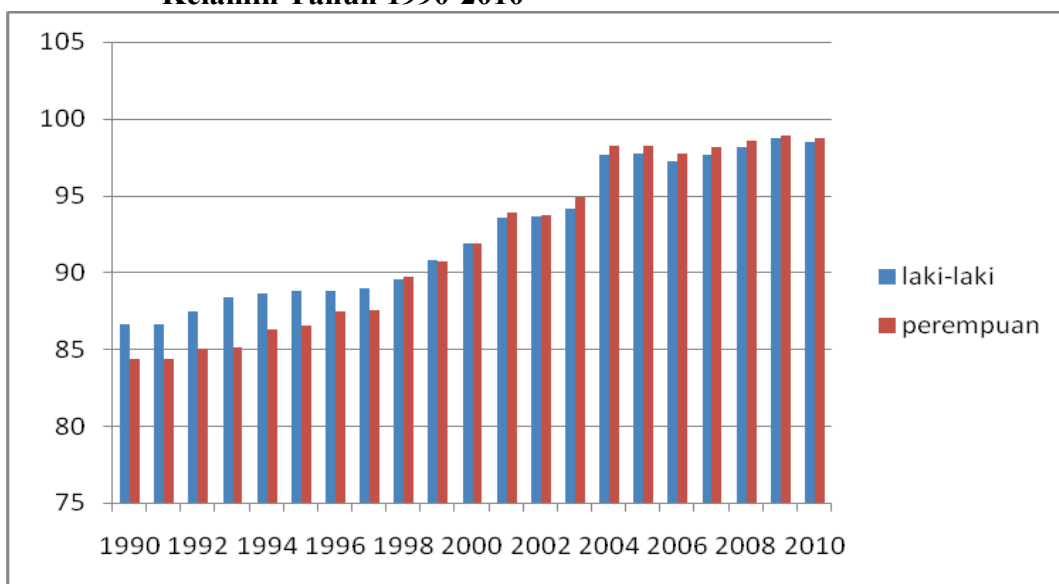
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017

Gambar 1 menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2015 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengalami buta huruf masih didominasi oleh kaum perempuan. Hal tersebut menggambarkan ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki. Terjadinya ketertinggalan ini dapat memicu terjadinya kesenjangan gender di tengah gerakan emansipasi wanita yang sedang gencar diwartakan saat ini. Terjadinya kesenjangan gender ini akan mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga (Balbuzanov, 2009). Hal ini mengingat dengan pemberian pendidikan dan pelatihan baik secara formal ataupun informal akan menjadikan baik itu kaum perempuan ataupun laki-laki menjadi lebih efisien dalam mengatur pola pengeluaran rumah tangga sehingga tidak memicu terjadinya diskriminasi antara laki-

laki dan perempuan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga, sehingga mampu menghindari terjadinya kekurangan terhadap pendapatan yang diperoleh.

Pendidikan selain akan berdampak terhadap peningkatan mutu dan kualitas SDM, tetapi juga akan memberi dampak bagi pertumbuhan yang lebih kondusif pada dunia bisnis (Artana Yasa, 2015). Menurut Rajab (2002), pendidikan adalah langkah awal yang akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat partisipasi pendidikan dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan tingkat kesenjangan gender yang masih terjadi di Indonesia (Efianingrum, 2008). Data tingkat partisipasi sekolah penduduk Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Gambar 2 Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990-2010



Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahawa dari tahun 1990-1997 tingkat partisipasi perempuan lebih rendah di bandingkan laki-laki. Meskipun demikian dari tahun ke tahun tingkat partisipasi perempuan terus mengalami peningkatan. Pendidikan pada dasarnya memiliki peran yang cukup besar

dalam proses perbaikan tingkat pendapatan (Kurniawan, 2016). Dunia pendidikan terus menggulirkan konsep gender untuk mencapai keseimbangan peran dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Tetapi hal itu tidak semulus harapan, disebabkan oleh budaya, pandangan dan ideologi patriarki, sehingga kecerdasan intelektual yang dimiliki perempuan sangat kurang dibandingkan laki-laki (Ampera, 2012).

Terjadinya fenomena kesenjangan gender disebabkan oleh banyak faktor sosio-kultural, terutama peran keluarga yang mensosialisasi dan internalisasi nilai-nilai patriarki. Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender adalah marginalisasi, subordinasi, pandangan stereotype, kekerasan dan beban ganda, terutama terkait dengan pendidikan.

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM. Menurut Hariwan (2015), rendahnya kualitas akan berpengaruh terhadap produktivitas. Penurunan produktivitas akan berdampak terhadap penurunan pendapatan yang diterima masyarakat. Rendahnya pendapatan akan berpengaruh terhadap iklim investasi, sehingga hal ini akan berdampak pada keterbatasan lapangan kerja sehingga akan meningkatkan pengangguran. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, sehingga jauh dari kata sejahtera dan makmur.

Terjadinya diskriminasi gender akan menentukan tingkat partisipasi perempuan untuk bekerja. Mengingat di tengah perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan kebutuhan menjadikan tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Perempuan dalam menjalankan peranannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja perempuan harus mampu mengatur

berbagai macam kebutuhan rumah tangga (Dewi, 2012). Oleh karena itu perempuan harus mendapatkan tingkat pendidikan.

Fenomena riil menunjukkan bahwa kesenjangan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender akan menyebabkan salah satu pihak mengalami diskriminasi atas pihak lain (Sohn, 2015). Ketidakadilan gender dapat terjadi karena berbagai faktor seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Heckman, 1998).

Pengaturan yang salah terhadap pola pengeluaran akan menyebabkan dampak yang tidak baik terhadap proses menuju peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian Deaton (1998) menemukan bahwa penambahan seorang anak perempuan ke rumah tangga menyebabkan pengeluaran dalam kategori ini turun kurang dari penambahan anak laki-laki. Dilihat dari perkembangannya pada periode sebelum adanya gerakan emansipasi wanita di bawah tahun 2005, kaum laki-laki cenderung lebih diprioritaskan, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi semenjak berkembangnya pergerakan emansipasi wanita, kini mulai ada kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, terutama di bidang pendidikan (Kingdon, 2005).

Upaya pencaian kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan maka perlu adanya suatu penilaian terhadap hasil kebijakan tersebut yaitu apakah benar dengan adanya kebijakan kesetaraan gender dapat mengurangi terjadinya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan pada kesenjangan pengeluaran rumah tangga di

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesenjangan pengeluaran rumah tangga antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan pada metode ini berupa data-data yang menunjukkan adanya perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan akibat adanya diskriminasi. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma komparatif. Alasan dipilihnya Indonesia sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Indonesia saat ini angka diskriminasi gender masih terbilang tinggi.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan data IFLS. Data IFLS digunakan dalam penelitian ini adalah dari dua gelombang yaitu pada gelombang kedua tahun 1997 sampai gelombang kelima di tahun 2014. Data IFLS dapat diakses melalui <http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS.html>. IFLS. Perhitungan diskriminasi dilakukan dengan membandingkan jumlah pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap jumlah pengeluaran rumah tangga total.

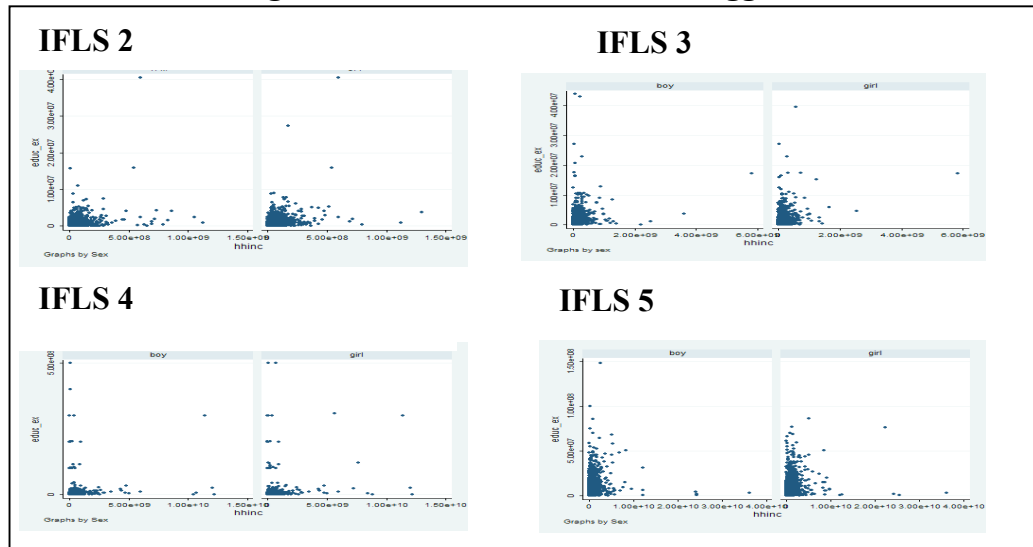
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga di Indonesia

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan anak adalah tingkat pendapatan orang tuanya. Secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan anak sangat erat kaitannya dengan penghasilan/pendapatan orang tua. Dalam hal ini pendapatan orang tua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak (Fitrianingsih, 2016). Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan

survei longitudinal terhadap aspek kehidupan rumah tangga melalui *Indonesiaa Family Life Survei* (IFLS). Berikut ini adalah pola pengeluaran rumah tangga di Indonesia menurut data IFLS 2 sampai 5 yang telah diolah dengan program stata.

Gambar 3 Pola Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga di Indonesia



Sumber: Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) diolah dengan aplikasi stata.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia di landa krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif (Nugrahani dan Dian, 2011). Hal ini berdampak terhdap penurunan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga akan mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Hasil analisis data IFLS 2 (1997) pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pola pengeluaran pendidikan rumah tangga di Indonesia tahun 1997. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan anak rendah.

Selanjutnya pada hasil olah data IFLS 3 (2000) pada Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan semakin meningkat daripada tahun sebelumnya di tahun 1997 (IFLS 2). Apabila dilihat lebih jau dan

dibandingkn dengan tahun sebelumnya (IFLS 2), maka pengeluaran rumah tangga cenderung lebih tinggi untuk anak laki-laki daripada perempuan. Terjadinya peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan diindikasikan terjadi akibat adanya proses *recovey* perekonomian Indonesia, melalui restrukturisasi perbankan (Sabirin, 2000).

Lebih lanjut pada hasil olah data IFLS 4 (2007) menunjukkan bahwa pola pengeluaran pendidikan rumah tangga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada 2000 (IFLS 3) akibat adanya peningkatan pendapatan. Apabila dilihat lebih jauh, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (IFLS 3) maka terjadi perbedaan, dimana pengeluaran rumah tangga cenderung lebih tinggi untuk anak perempuan daripada laki-laki, akibat munculnya gerakan emansipasi wanita. Samuelson (2004:128) menyatakan kajian ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan merupakan penentu utama dari pengeluaran rumah tangga.

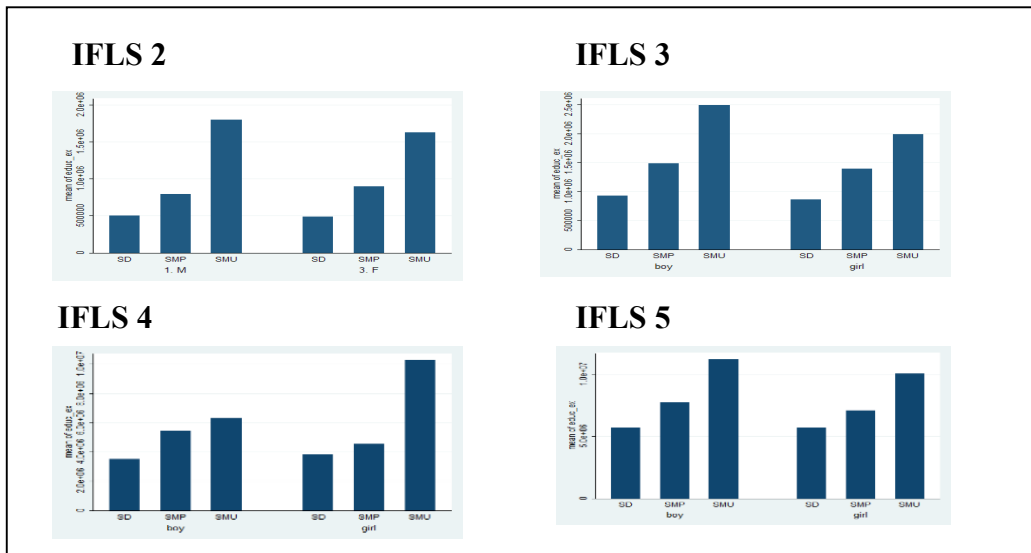
Hasil olah data IFLS 5 (2014) menunjukkan bahwa pola pengeluaran pendidikan rumah tangga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada 2007 (IFLS 4) dan tingkat pendapatan rumah tangga juga semakin tinggi. Apabila dilihat lebih jauh, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (IFLS 4) maka terjadi perbedaan, dimana pada tahun 2014 pengeluaran pendidikan rumah tangga cenderung lebih tinggi untuk anak laki-laki daripada perempuan. Pernyataan ini di dukung penelitian Sari dkk. (2017), yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan merupakan investasi yang bagus untuk pembagunan nasional.

Pengeluaran Pendidikan Anak Menurut Jenis Kelamin di Indonesia

Berdasarkan Gambar 4, hasil analisis dengan stata menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Terjadinya perbedaan tersebut diindikasikan karena pola pengeluaran rumah tangga Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusnani (2013), yang menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang paling mendasar dalam perkembangan pendidikan anak. Perkembangan pengeluaran pendidikan anak menurut jenis kelamin di Indonesia dengan IFLS 2 sampai 5 dapat dilihat sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis data IFLS 2 (1997) pada Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran untuk tingkat pendidikan SD dan SMP antara anak laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan untuk pendidikan tingkat SMU, anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan.

Gambar 4 Pengeluaran Pendidikan Anak Menurut Jenis Kelamin di Indonesia



Sumber: Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) diolah dengan aplikasi stata.

Selanjutnya hasil olah data IFLS 3 (2000) pada Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran untuk tingkat pendidikan SD dan SMP hampir sama atau setara.

Sedangkan untuk pendidikan SMA anak perempuan jauh di bawah anak laki-laki. Hasil IFLS 3 ini sama dengan hasil dari IFLS 2. Sudarta (2008) mengungkapkan bahwa, pandangan kultural menyebabkan masyarakat cenderung lebih mengutamakan lebih memperhatikan pendidikan formal anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

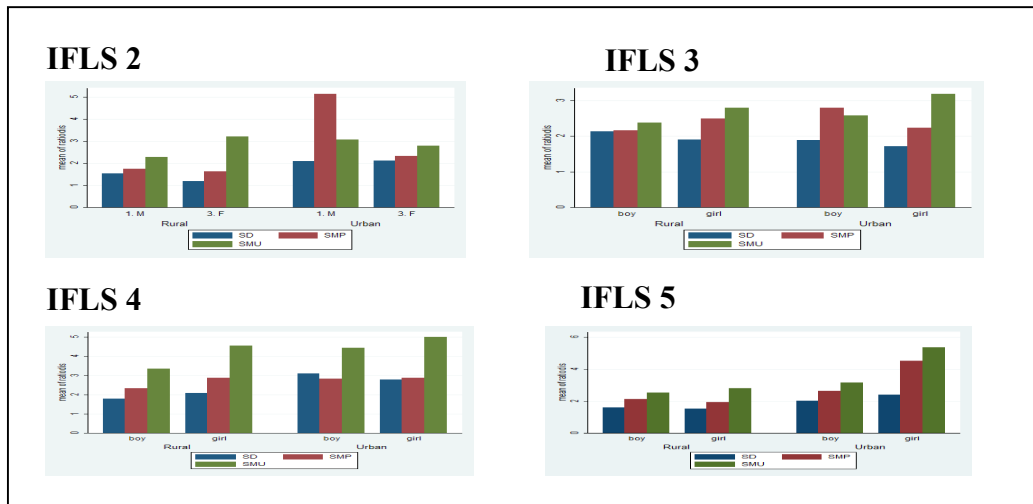
Lebih lanjut hasil olah data IFLS 4 (2007) pada Gambar 4, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran untuk tingkat pendidikan SD cenderung lebih tinggi untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Untuk tingkat pendidikan SMP lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk tingkat SMU jauh lebih tinggi anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Hasil ini berbeda dari hasil dari IFLS 3, dimana untuk pengeluaran pendidikan SMU pada IFLS 3 cenderung lebih banyak anak perempuan. Hal ini terjadi karena munculnya gerakan emansipasi wanita, yang memperjuangkan agar pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan setara (Abidin, 2017). Artinya, anak perempuan harus diberikan hak yang sama untuk menikmati pendidikan.

Selanjutnya, pada data IFLS 5 (2014) pada Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga untuk tingkat pendidikan SD dan SMP cenderung sama antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Hasil ini berbeda dengan IFLS 4 yang cenderung lebih banyak anak perempuan.

Berdasarkan daerah Desa dan Kota, hasil analisis data IFLS2 sampai 5 menunjukkan bahwa secara umum terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan anak untuk

di daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat perekonomian antara di desa dan di perkotaan (Djoko dkk., 2017).

Gambar 5 Pengeluaran Pendidikan Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Desa dan Kota



Berdasarkan hasil analisis data IFLS 2 (1997) dengan stata pada Gambar 5 menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di desa untuk tingkat SD lebih banyak diperuntukkan untuk anak laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya untuk tingkat SMP bisa dikatakan seimbang antara jumlah anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah. Pada tingkat SMU ternyata untuk di daerah pedesaan lebih tinggi anak perempuan. Untuk di daerah perkotaan untuk pendidikan di tingkat SD antara anak laki-laki dan perempuan cenderung sama, untuk tingkat SMP cenderung lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan, dan untuk tingkat SMU dapat dikatakan hampir setara.

Pada data IFLS 2 menunjukkan bahwa untuk di daerah desa cenderung di tinggi perempuan karena keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak perempuan tidak terlepas dari motif dan keinginan untuk memperbaiki hidup, karena diharapkan akan

mendapatkan suami yang berpendidikan juga, sehingga akan memperbaiki kehidupan keluarga (Wahyono, 2010).

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah karena tingkat pendapatan rumah tangga di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Selain itu kesenjangan pendidikan antara di daerah pedesaan dengan di perkotaan dapat dilihat dari ketersediaan guru, fasilitas sekolah, akses transportasi dan lain sebagainya (Vito dkk., 2015).

Selanjutnya perkembangan ditingkat desa dan kota untuk data IFLS 3 (2000) berbeda dengan IFLS 2. Hasil olah IFLS 3 menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di desa untuk tingkat SD lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk di daerah perkotaan pendidikan anak tingkat SD antara anak laki-laki dan perempuan cenderung setara. Sedangkan untuk pendidikan tingkat SMP lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya, untuk tingkat SMU lebih tinggi anak perempuan dibandingkan laki-laki.

Apabila dibandingkan dengan hasil IFLS 2 maka pada IFLS 3, jika dilihat dari perbandingannya maka untuk anak laki-laki dengan tingkat pendidikan SMP di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada anak laki-laki di daerah pedesaan. Hal ini karena dampak dari perbedaan pendapatan yang diperoleh orangtua anak di daerah pedesaan dan di perkotaan. Dimana pendapatan orang yang bekerja di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan (Baculu, 2012). Jika dilihat perbandingan untuk anak

perempuan dengan tingkat pendidikan SMU lebih tinggi di daerah perkotaan daripada pedesaan. Hal ini diindikasikan karena makin meningkatnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya dan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini (Fitrianti & Habibullah, 2012). Pernikahan dini masih merupakan fenomena umum di Indonesia. Fenomena ini dimotivasi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi dan budaya (Saskara, 2018).

Lebih lanjut perkembangan ditingkat desa dan kota untuk data IFLS 4 (2007) menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di desa untuk tingkat SD dan SMP hampir setara antara anak laki-laki dengan perempuan. Tetapi sedikit berbeda dengan hasil IFLS 3 (2000), hasil IFLS 4 (2007) menunjukkan bahwa untuk di tingkat pendidikan SMU lebih tinggi anak perempuan di bandingkan laki-laki. Hal ini diindikasikan terjadi karena timbulnya gerakan emansipasi wanita, yang mengumandangkan bahwa harus ada kesetaraan antara wanita dan laki-laki dalam hal pendidikan samapi tingkat SMA (Hasnah, 2011).

Perkembangan pendidikan untuk di daerah perkotaan, hampir sama seperti di daerah pedesaan, dimana tingkat pendidikan anak tingkat SD dan SMP antara anak laki-laki dan perempuan cenderung sudah setara. Sedangkan untuk pendidikan tingkat SMA lebih tinggi anak perempuan dibandingkan laki-laki. Apabila dibandingkan dengan hasil pada IFLS 3, jika dilihat dari perbandingannya maka pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena kota merupakan pusat dari kegiatan perekonomian, sehingga peluang untuk memperoleh pendapatan di daerah perkotaan akan lebih tinggi dari di pedesaan. Pengeluaran pendidikan anak akan sangat ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh orangtuanya. Artinya semakin tinggi

pendapatan orang tua maka akan memberi peluang semakin besar untuk mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi (Fitrianingsih, 2016).

Selanjutnya, perkembangan ditingkat desa dan kota untuk data IFLS 5 (2014) ditunjukkan oleh Gambar 5 menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di desa untuk tingkat SD, SMP dan SMU hampir setara antara anak laki-laki dengan perempuan. Hasil yang ditunjukkan sedikit berbeda dengan hasil IFLS 4 (2007), hasil IFLS 5 (2014) menunjukkan bahwa orang tua telah menyadari pentingnya pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuannya.

Perkembangan pendidikan untuk di daerah perkotaan menunjukkan perbedaan hasil dengan IFLS 4 (2007), dimana hasil IFLS 5 (2014) menunjukkan tingkat pendidikan di kota lebih tinggi daripada di desa. Jika dilihat perkembangan pendidikan desa dan kota menurut jenis kelamin anak, maka dapat dilihat hasil yang konsisten dengan hasil IFLS 4 (2007), yaitu untuk tingkat pendidikan anak tingkat SD, SMP dan SMA cenderung lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini diindikasikan karena semakin gencarnya gerakan emansipasi wanita dan kebijakan pemerintah terkait dengan kesetaraan gender. Hal ini menjadikan perempuan lebih banyak muncul di ruang publik (Mustikawati, 2015).

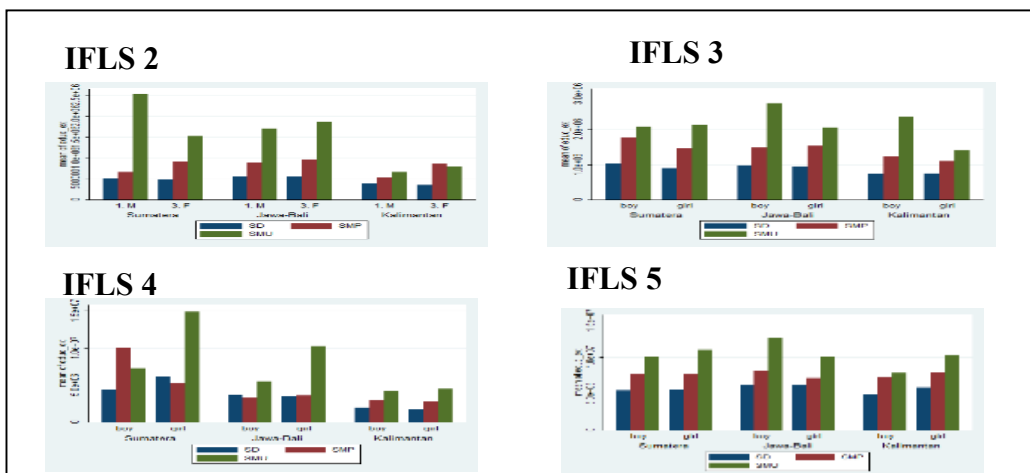
Perbandingan Pengeluaran Pendidikan Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Berdasarkan Gambar 6, hasil analisis dengan stata menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Terjadinya perbedaan tersebut diindikasikan karena perbedaan tingkat ekonomi, sosial dan budaya pada masing-masing daerah di Indonesia. Perkembangan pengeluaran pendidikan anak

menurut jenis kelamin di Indonesia dengan IFLS 2 sampai 5 dapat dilihat sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis data dengan stata pada Gambar 6 menunjukkan perbandingan pendidikan anak laki-laki dan perempuan menurut daerah. Hasil analisis IFLS 2 (1997) menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan menurut daerahnya, dengan rincian sebagai berikut, untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD cenderung sudah setara antara anak laki-laki dan perempuan, pada tingkat pendidikan SMP cenderung didominasi oleh perempuan, sedangkan tingkat SMU cenderung lebih tinggi anak laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, masih terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan pada tingkat pendidikan SMU.

Gambar 6 Pengeluaran Pendidikan Anak Laki-laki dan Perempuan Menurut Daerah



Sumber : Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) diolah dengan aplikasi stata.

Di daerah Jawa-Bali tingkat pendidikan baik itu SD, SMP dan SMU cenderung sudah setara antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan

perempuan untuk di daerah Jawa-Bali. Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung sudah setara antara anak laki-laki dengan perempuan. Untuk tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih tinggi perempuan di bandingkan laki-laki.

Selanjutnya, hasil analisis IFLS 3 (2000) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil IFLS 2 (1997), pada IFLS 3 (2000) pada Gambar 6 menunjukkan untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD dan SMP cenderung lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU cenderung lebih tinggi anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, masih terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan pada tingkat pendidikan SD dan SMP.

Hasil IFLS 3 (2000) ddi daerah Jawa-Bali berbeda dengan IFLS 2 (1997). Hasil IFLS 3 pada Gambar 6 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD dan SMP cenderung sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU cenderung lebih banyak anak laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SMU masih terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung sudah setara antara anak laki-laki dan perempuan, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih tinggi anak laki-laki. Hal ini mengindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMU, sedangkan untuk tingkat pendidikan SD sudah tidak terjadi diskriminasi.

Selanjutnya, hasil analisis IFLS 4 (2007) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil IFLS 3 (2000). Pada IFLS 4 (2007) pada Gambar 6 menunjukkan untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP cenderung lebih tinggi anak laki-laki, sedangkan SD dan SMU cenderung lebih tinggi anak perempuan dibandingkan laki-laki. Terjadinya ketimpangan ini diindikasikan karena adanya perbedaan perspektif ideologi partiliniyal, yang lebih mengutamakan anak laki-laki dan sosialisasi nilai pada rumah tangga (Purba, 2005).

Hasil IFLS 4 (2007) di daerah Jawa-Bali berbeda dengan IFLS 3 (2000). Hasil IFLS 4 pada Gambar 6 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD dan SMP cenderung sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU cenderung lebih banyak anak perempuan. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung lebih tinggi anak laki-laki, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMU sudah tidak terjadi diskriminasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahyono (2004:75) yang menemukan bahwa terdapat pandangan yang positif dari keluarga di bantaran sungai Kalimantan terhadap pendidikan anak-anaknya.

Lebih lanjut, hasil analisis IFLS 5 (2014) menunjukkan hasil yang sama dengan hasil IFLS 4 (2007). Pada IFLS 5 (2014) pada Gambar 6 menunjukkan untuk di

wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD, SMP cenderung sudah setara antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU lebih tinggi anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, sudah tidak terjadi diskriminasi untuk anak perempuan dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini juga terjadi karena wilayah Sumatra sebagian besar menganut sistem budaya matrilineal yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis (Ariani, 2015).

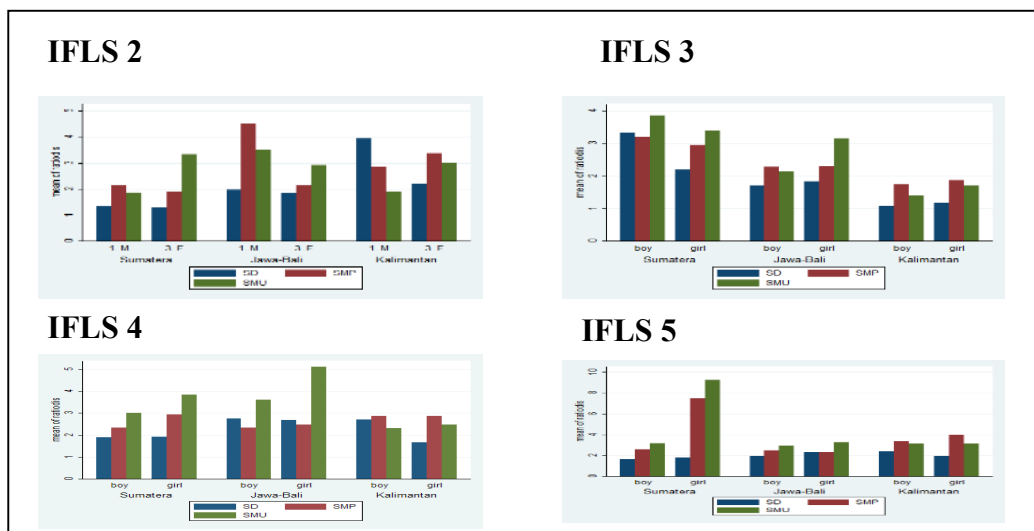
Hasil IFLS 5 (2014) di daerah Jawa-Bali berbeda dengan IFLS 4 (2007). Hasil IFLS 5 pada Gambar 6 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD cenderung sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih banyak anak laki-laki. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SD sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMU diindikasikan masih terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali. Hal ini dipengaruhi oleh budaya.

Hasil IFLS 5 (2014) di daerah Kalimantan berbeda dengan IFLS 4 (2007). Hasil IFLS 5 pada Gambar 6 menunjukkan untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD, SMP dan SMA cenderung lebih tinggi anak perempuan di bandingkan laki-laki. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya sudah tidak terjadi diskriminasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pendidikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Widodo (2013) mengenai kesadaran akan pentingnya wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan Gambar 7, hasil analisis dengan stata menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan pada masing-masing daerah di Indonesia. Terjadinya perbedaan tersebut diindikasikan karena perbedaan tingkat ekonomi, sosial dan budaya pada masing-masing daerah di Indonesia. Perkembangan pengeluaran pendidikan anak menurut jenis kelamin di Indonesia dengan IFLS 2 sampai 5 dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4.5 Pengeluaran Pendidikan Anak Laki-laki dan Perempuan Menurut Daerah Menggunakan Rasio Diskriminasi



Sumber: Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) diolah dengan aplikasi stata.

Berdasarkan hasil analisis data dengan stata pada Gambar 7 menunjukkan perbandingan pendidikan anak laki-laki dan perempuan menurut daerah dengan menggunakan rasio diskriminasi, yaitu dengan membandingkan pengeluaran rumah tangga dari sisi pendidikan dengan pengeluaran rumah tangga non makanan. Hasil analisis IFLS 2 (1997) menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan menurut daerahnya, dengan rincian sebagai berikut, untuk di wilayah Sumatra pada tingkat

pendidikan SD dan SMP cenderung sudah setara antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan pada tingkat pendidikan SMU cenderung lebih tinggi anak perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara bagi anak perempuan.

Di daerah Jawa-Bali tingkat pendidikan baik itu SD, SMP dan SMU laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini diindikasikan terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi anak perempuan untuk di daerah Jawa-Bali. Hal ini terjadi karena pengaruh budaya. Hal ini sesuai Rahayu dan Wigna (2010), yang menyatakan bahwa salah satu penyebab ketimpangan gender di dalam lingkungan masyarakat adalah budaya.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung lebih tinggi anak laki-laki, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih tinggi anak perempuan, meskipun perbedaan yang ditunjukkan tidak pada interval yang jauh. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sudah tidak terjadi diskriminasi pendidikan untuk anak perempuan.

Hasil analisis IFLS 3 (2000) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil IFLS 2 (1997), pada IFLS 3 (2000) pada Gambar 7 menunjukkan untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU cenderung cenderung lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, masih terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi perempuan.

Hasil IFLS 3 (2000) di daerah Jawa-Bali berbeda dengan IFLS 2 (1997). Hasil IFLS 3 pada Gambar 7 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD dan SMP cenderung sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU cenderung lebih banyak anak perempuan. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung lebih tinggi anak laki-laki, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung lebih tinggi anak perempuan, meskipun perbedaan yang ditunjukkan tidak pada interval yang jauh. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sudah tidak terjadi diskriminasi.

Hasil analisis IFLS 4 (2007) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil IFLS 3 (2000). Pada IFLS 4 (2007) pada Gambar 7 menunjukkan untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU cenderung cenderung lebih tinggi anak perempuan dibandingkan laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena faktor budaya. Budaya matrilineal yang berkembang di Pulau Sumatra merupakan budaya yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis (Ariani, 2015).

Hasil IFLS 4 (2007) di daerah Jawa-Bali berbeda dengan IFLS 3 (2000). Hasil IFLS 4 pada Gambar 7 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD dan SMP cenderung

sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk ptingkat pendidikan SMU cenderung lebih banyak anak perempuan. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMP sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung lebih tinggi anak laki-laki, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sudah tidak terjadi diskriminasi.

Hasil analisis IFLS 5 (2014) menunjukkan hasil yang sama dengan hasil IFLS 4 (2007). Pada IFLS 5 (2014) pada Gambar 7 menunjukkan untuk di wilayah Sumatra pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU cenderung cenderung lebih tinggi anak perempuan dibandingkan laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk di daerah Sumatra dan sekitarnya, sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan.

Hasil IFLS 5 (2014) di daerah Jawa-Bali sama dengan IFLS 4 (2007). Hasil IFLS 5 pada Gambar 7 menunjukkan tingkat pendidikan baik itu SD dan SMP cenderung sudah hampir setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMU cenderung lebih banyak anak perempuan. Hal ini mengindikasikan untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU sudah tidak terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Jawa-Bali.

Untuk di daerah Kalimantan untuk tingkat SD cenderung lebih tinggi anak laki-laki, selanjutnya tingkat pendidikan SMP dan SMU cenderung setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini diindikasikan diskriminasi dalam bidang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan untuk di daerah Kalimantan dan sekitarnya hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sudah tidak terjadi diskriminasi bagi anak perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang menjadi faktor pendorong implementasi kebijakan wajar 9 tahun yaitu kesadaran wali murid dan siswa, (Widodo, 2013).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari pola pengeluaran masyarakat, data IFLS 2 sampai IFLS 5 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan semakin meningkat. Pengeluaran pendidikan anak menurut jenis kelamin di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun (Data IFLS2 samapai IFLS 5). Berdasarkan desa kota menunjukkan bahwa secara umum terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan anak untuk di daerah pedesaan dan perkotaan (Data IFLS2 samapai IFLS 5. Perbandingan pengeluaran pendidikan anak laki-laki dan perempuan berdasarkan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengeluaran pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di masing-masing daerah, yaitu Sumatra, Jawa-Bali dan Kalimantan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku pada masing-masing daerah.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis adalah pendidikan akan sangat mempengaruhi dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah seyogyanya mengembangkan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Pada kehidupan masyarakat masih terdapat nilai-nilai sosial yang menghambat kesetaraan gender, dimana dalam mengatasi situasi tersebut seharusnya disadari bahwa secara konseptual pendidikan terbuka bagi transformasi nilai-nilai baru yang membebaskan dan berkeadilan, bukan sebaliknya.

REFERENSI

- Ampera, Dina. 2012. Kajian Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD. *Jurnal Tabularasa Pps Unimed*. 9(2): 229-246.
- Ariani, Iva. 2015. Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, h: 32-55.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>>. Date accessed: 15 mar. 2018. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2015.v08.i01.p07>.
- Balbuzanov, Ivan and Colby College. 2009. Searching for Evidence of Boy-Girl Discrimination in Household Expenditure Data: Evidence from Gansu Province, China. *Issues in Political Economy*, Vol 19, 2009, 90-107.
- Cahyono, Reki. 2004. Kajian Historis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bantaran Daerah Aliran Sungai Brantas. *Jurnal*.

- Deaton, Angus, Javier Ruiz-Castillo, and Duncan Thomas. 1989. The influence of household composition on household expenditure patterns: theory and Spanish evidence. *Journal of Political Economy* 97: 179-200.
- Deaton, Angus. 1988. Looking for Boy-Girl Discrimination in Household Expenditure Data. *The World Bank Economics Review*,3(1): pp: 1-15.
- Dewi, Putu Martini. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1906>>. Date accessed: 15 mar. 2018.
- Efianingrum, Ariefa. 2008. Pendidikan dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender. *Jurnal Fondasia*.
- Espinal, Rosario dan Sherri Grasmuck. 1997. Gender, Households and Informal Entrepreneurship in The Dominican Republic. *Journal of Comparative Family Studies*. 28(1), pp: 103-128.
- Fitrianingsih, Bambang Genjik. Dan S, Rum Rosyid. 2016. Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal. Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*
- Fitrianti, Rahmi., & Habibullah, 2012. Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Sosiokonsepsia*, 17(10), H: 85-100.
- Hardjanto. 2002. Mutu Modal manusia dan Pertumbuhan ekonomi Human Capital dan Economic Growth. *Jurnal Manajemen Human Tropica* 3(1): h: 65-71.
- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16496>>. Date accessed: 15 mar. 2018. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2015.v08.i01.p08>.
- Hasnah, Siti. 2011. Emansipasi Wanita Dalam Kemitrasejajaran Dan Pendidikan Islam. *Musawa*, Vol. 3, No. 1, H: 39-54.

- Heckman, James J. 1998. Detecting Discrimination. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 12, Number 2, Pages 101-116.
- Kingdon, Geeta Gandhi. 2005. Where has all the bias gone? Detecting gender bias in the intrahousehold allocation of educational expenditure. *Economic Development and Cultural Change* 53: 409-451.
- Kurniawan, Jarot. Dilema Pendidikan Dan Pendapatan Di Kabupaten Grobogan. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/22756>>. Date accessed: 15 mar. 2018. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p07>.
- Mustikawati, Citra. 2015. Pemahaman Emansipasi Wanita. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 3, No. 1, h:65-70.
- Nugrahani, Tri Siwi dan Dian Hiftiani Tarioko. 2011. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik Dan Ekspor Antara Sebelum Dan Sesudah Krisis. *Akmenika UPY*, Vol. 8, h: 48-66.
- Purba, Jonni. 2005. Ketimpangan Gender dan Bertahannya Konstruksi Patriarkhi dalam Masyarakat Karo. *Jurnal Sosial Budaya*, Edisi 01.
- Purnastuti, Losina., Paul W. Miller dan Ruhul Salim. 2013. Declining rates of return to education: evidence for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(2), pp: 213-236.
- Quayes, Shakil and Richard David Ramsey. 2015. Gender Disparity In Education Enrollment In Pakistan. *Asian Economic and Financial Review*, 5(3):407-417.
- Rahayu, Rehasti Dya dan Wigna, Winati. 2010. Pengaruh Lingkungan Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Terhadap Persepsi Gender Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan. *Jurnal*. Departemen Sains KPM FEMA IPB.
- Rajab, B. 2002 Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kedudukan Perempuan. *Jurnal perempuan*, No. 23.
- Rusnani. 2013. Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SD Pinggir Papas I Kec. Kalianget. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi* Volume III, No.2, h: 83-100.
- Sabirin, Syahril. 2000. Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Strategi Kebijakan Moneter – Perbankan Dan Independensi Bank Indonesia. Makalah untuk disajikan pada Seminar Nasional : “Strategi Pemulihan Ekonomi Era Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan oleh KAGAMA Jawa Timur dan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) di Surabaya.

- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 2004. *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Sari, Haifa., Sofyan Syahnur., dan Chenny Seftarita. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi. Rokok Pada Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Volume 3 Nomor 2, h: 117-133*.
- Saskara, Ida Ayu Nyoman. Pernikahan Dini dan Budaya. **Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan**, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 108-110, feb. 2018. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/36612>>. Date accessed: 15 mar. 2018. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11.i01.p09>.
- Sohn, Kitae. 2015. Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), pp: 95-121.
- Sudarta, Wayan. 2008. *Ketimpangan Gender Di Bidang Pendidikan*. Diakses melalui: <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ketimpangan%20gender.pdf>. [diakses tanggal 24 Desember 2017].
- Takahashi, Kazushi. 2011. Determinants of Indonesian rural secondary school enrolment: gender, neighbourhood and school characteristics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), pp: 395-413.
- Vito, Benediktus., dan Hetty Krisnani. 2015. Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota. *Jurnal Prosding dan penelitian pengabdian Masyarakat. Vol 2, No. 2*
- Widodo, Aji Andri. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol II, No. 2*.
- Zeng Yi, Tu Ping, Gu Baochang, Xu Yi, Li Bohua, and Li Yongping. 1993. Causes and implications of the recent increase in the reported sex ratio at birth in China. *Population and Development Review* 19: 283-302.